

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU TERAKHIR AGUSTUS 2012

Rangkuman berita dalam edisi minggu terakhir Agustus 2012 ini, memuat intisari singkat Pidato Presiden RI dalam: [1] Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2012 pagi hari, dan [2] Pidato Pengantar RUU APBN 2013 dan Nota Keuangan, pada malam hari. Berikut ringkasannya:

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alié

Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI

Pertama, di abad ke-21 misi besar bangsa Indonesia adalah melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita, Pemerintah dan segenap bangsa, pada tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dapat membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul. Dalam lima tahun, kita terus membangun menuju negara yang makin sejahtera, demokratis dan berkeadilan, dalam lingkungan global yang dinamis, yang memberi peluang sekaligus tantangan.

Kedua, sejarah telah mencatat, dalam lima dekade terakhir di abad ke-21, kondisi dunia memberikan gambaran yang positif dan menjanjikan, karena tidak ada lagi perang besar yang melibatkan beberapa negara sebagaimana Perang Dunia I dan II. Namun, kita dihadapkan pada situasi ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian. Krisis di Eropa terus berlanjut, tidak ada titik terang. Negara maju mengalami stagnasi bahkan resesi. Ekonomi negara berkembang mengalami perlambatan yang berarti.

Ketiga, di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, didapatkan pada tantangan tradisional seperti potensi konflik perbatasan dan tantangan non-tradisional yang membawa dampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Keempat, saat ini negara kita tampil sebagai sebuah negara *emerging economy* dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Kita menjadi negara yang berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil diturunkan. *Insyallah*, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan maju di Asia, dan diper-



hitungkan dunia pada saatnya nanti. Namun, kita patut mewaspadaai imbas dari krisis keuangan yang memicu oleh perkembangan di Eropa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemerintah telah dan akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, sebagaimana pengalaman yang berharga, yang telah dilampauai dengan selamat pada krisis 2008.

Keberhasilan itu ditentukan oleh kolaborasi serta sinergi diantara jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan, serta lembaga-lembaga lainnya, agar sektor riil dapat berjalan normal. Pemerintah memberikan stimulus fiskal

secara hati-hati, dikendalikan, agar tidak terjadi gelombang pengangguran baru. Pemerintah memberikan protensi untuk melindungi, membantu dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi.

Ada enam isu penting dan aktual, yang perlu diperhatikan adalah: [1] pemberantasan korupsi yang harus terus berjalan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merusak sendi-sendi penopang pembangunan. Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. [2] reformasi birokrasi dan *good governance*, menjadi sangat penting, mengingat untuk mengelola negara besar dan luas, memerlukan kesungguhan dan keseriusan segenap aparat pemerintah dari Pusat sampai Daerah; [3] kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu ini menjadi persoalan serius, yang harus dapat dihindari dan terutama tidak boleh bersikap menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negara harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horizontal.

[4] iklim investasi dan kepastian hukum. Kita masih mengalami hambatan menghadapi isu ini, yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan, karena isu ini menciptakan ketidakpas-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO**: Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

tian dan ekonomi biaya tinggi serta hilangnya kesempatan pertumbuhan yang berkualitas; [5] pembangunan infrastruktur. Ini terkait dengan iklim investasi. Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara kita, sesungguhnya akan menarik bagi investor untuk berinvestasi, oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus mendapatkan penanganan sebaik-baiknya. [6] kebijakan menghadapi krisis global serta kesehatan fiskal. Di tengah-tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global, kita semakin tertantang untuk mampu menjaga kesehatan fiskal kita, dan harus mampu memberikan stimulus pembangunan dengan mengedepankan semangat kehati-hatian.

Pidato Presiden Pengantar RUU APBN 2013 dan Nota Keuangan

Pertama, dalam kata pembuka, Presiden mengatakan bahwa penyusunan RAPBN 2013 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan kondisi ekonomi, baik domestik maupun global. Sekaligus memperhatikan upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Selain itu, penyusunan RAPBN 2013 juga dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI serta pertimbangan DPD-RI yang telah disampaikan dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN.

Kedua, dalam Pokok-Pokok Substansi RAPBN 2013, Presiden menyampaikan secara singkat perkembangan situasi dan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik pada tahun 2012 dan prospeknya pada tahun 2013. Bahwa perkembangan ekonomi global dalam dua tahun terakhir telah diwarnai oleh ketidakpastian yang makin meningkat. Kondisi keuangan dunia yang tidak sehat menjadi makin ru-

mit, karena dua perkembangan penting lainnya yaitu melonjaknya harga pangan dunia dan berlanjutnya volatilitas harga minyak bumi.

Untuk Indonesia, tahun 2013, masih akan dibayangkan ketidaktentuan karena pertumbuhan ekonomi dunia proyeksinya diturunkan dari 4,1% menjadi 3,9%. Demikian pula pertumbuhan volume perdagangan dunia direvisi ke bawah dari perkiraan sebelumnya 5,6% menjadi hanya 5,1%.

Ketiga, *alhamdulillah*, menurut presiden, pada 2011 yang lalu, disaat beberapa negara mengalami perlambatan atau bahkan pertumbuhan negatif, Indonesia masih dapat meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu karena ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat.

Keempat, *insya allah*, kinerja ekonomi nasional akan dapat dipertahankan untuk tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I mencapai 6,3%, bahkan triwulan II 6,4%. Ekspor memang melambat, tetapi ternyata diimbangi oleh pengeluaran konsumsi dan investasi yang kuat melalui daya beli masyarakat dengan kelompok kelas menengah yang semakin besar, yang dapat mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Investasi juga terus meningkat, sejalan dengan naiknya peringkat utang Indonesia menjadi *investment grade*.

Kelima, untuk RAPBN 2013, Pemerintah telah mengantisipasi dampak negatif memburuknya situasi ekonomi dan keuangan global dengan melakukan berbagai langkah pengamanan dan mitigasi krisis. [1] Perubahan APBN 2012 dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global dan gejolak harga minyak dunia, pada kondisi fiskal dan perekonomian kita. Melalui APBN-P 2012, Pemerintah telah menyediakan anggaran stimulus fiskal dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk tambahan belanja



Sidang Penutupan Rapat Paripurna Ke-35 Masa Sidang IV

infrastruktur, tambahan anggaran subsidi energi, dan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. [2] telah dilakukan percepatan dan perbaikan penyerapan belanja, terutama belanja barang dan modal agar memberikan dampak yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi. [3] koordinasi dan kewaspadaan bersama antara Pemerintah dan otoritas moneter yang terus ditingkatkan untuk menghadapi berbagai tekanan akibat krisis. Untuk itu, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Lembaga Penjamin Simpanan telah menyiapkan sistem protokol manajemen krisis melalui Pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. [4] pemerintah bersama Bank Indonesia, telah mempersiapkan Strategi Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara (SBN). Dan [5] Pemerintah telah mempersiapkan fasilitas kedaruratan (*contingency facility*) secara bilateral dan multilateral yang sewaktu-waktu siap dipakai untuk mengamankan kondisi pasar domestik apabila diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut disertai pengalaman mengatasi krisis tahun 2008, *insya Allah*, Indonesia dapat mengamankan ekonomi nasionalnya dari gejolak ekonomi dan keuangan global.

Satu hal yang harus dicermati dalam pengelolaan keuangan negara dan RAPBN 2013 adalah faktor eksternal yang harus dicermati dan diwaspadai, terutama berkaitan dengan perkembangan harga minyak mentah dunia. Perkembangan harga minyak di pasar internasional sangat mempengaruhi perekonomian dan kondisi APBN kita. Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak, penuh dengan gejolak dan ketidakpastian.

Keenam, berbagai target yang ditetapkan, serta sasaran-sasaran utama dan prioritas dalam rencana kerja Pemerintah tahun 2013 ditujukan untuk mewujudkan "*Indonesia yang makin sejahtera demokratis dan berkeadilan*" sesuai visi RPJMN 2010-2014. Upaya peningkatan kesejahteraan terus dijalankan dengan memperkuat pelaksanaan empat pilar strategi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan. Keempat pilar strategi tersebut adalah: [1] pembangunan yang pro-pertumbuhan, [2] pro-lapangan pekerjaan, [3] pro-pengurangan kemiskinan; [4] pro-pengelolaan dan/atau ramah lingkungan. RKP 2013 dijadikan pedoman dan acuan utama dalam penyusunan RAPBN 2013.

Ketujuh, berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis, RAPBN 2013 terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran diatas 20 triliun rupiah, dengan urutan yaitu, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Kedelapan, dalam RAPBN 2013, Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar rata-rata 7%, mengacu pada tingkat inflasi. Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim, ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Terakhir, di bidang Anggaran Pembangunan Daerah. Anggaran transfer daerah, ditujukan terutama untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal, baik antara Pusat dan Daerah, maupun antar-Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar-Daerah.

Di dalam penyampaian Pengantar RAPBN 2013, secara khusus Presiden mengatakan, bahwa langkah khusus yang akan dan telah ditempuh adalah percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat masih jauh tertinggal dibanding wilayah lain di tanah air. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang intensif,

langkah-langkah pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Di kedua provinsi itu, dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan tenaga pengajar yang berkialitas dalam jumlah yang mencukupi. Untuk menembus keterisolasian, dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke Pegunungan Tengah. Demikian pula, ditingkatkan pelaksanaan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua di beberapa perguruan tinggi unggulan di luar Papua, di sejumlah instansi Pemerintah yang strategis, serta pemagangan di berbagai instansi pemerintah di luar Papua.**



Dirgahayu RI ke 67 Momentum Introspeksi Diri

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan peringatan kemerdekaan RI ke-67 hendaknya menjadi momentum bagi kita semua, segenap bangsa Indonesia untuk bercermin, melakukan introspeksi, refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan setelah lebih dari enam dasawarsa kita merdeka, dan untuk memastikan arah perjalanan bangsa ke depan.



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT RI ke-67 di Gedung DPR RI

Demikian dikatakan Marzuki Alie dalam Pidato Kenegaraannya di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dalam rangka hari Ulang Tahun RI ke-67 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8).

“Walaupun kita telah melalui reformasi di bidang Politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan sejak tahun 1998, namun kita masih merasakan bahwa masih banyak yang harus ditata, dirawat dan dikelola secara baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat,” jelas Marzuki.

Ia menambahkan, sebagaimana kita pahami, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia yang telah diakui oleh masyarakat dunia. “Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar, melalui amandemen UUD Negara RI tahun 1945 dan

perundang-undangan lainnya, harus makin berkualitas dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Marzuki menerangkan, bahwa peradaban demokrasi yang dibangun, harus bersendikan kepada hakikat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia, penghargaan kepada keberagaman, pluralism, dalam bingkai kebangsaan dan harus memberikan penguatan bagi nation and character building.

“Satu hal yang harus tetap kita jaga, aset terpenting dari kemerdekaan RI adalah persatuan dan kesatuan bangsa, bagi kita persatuan adalah kekuatan yang merupakan awal dari kebangkitan,” tegas Marzuki dalam

sambutannya di hadapan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta menteri-menterinya, para tamu Undangan yang terdiri dari Duta Besar perwakilan negara-negara bersahabat, juga anggota DPR RI dan DPD RI.

Selanjutnya, menurut Marzuki Alie, sejarah telah membuktikan, betapa beratnya tantangan yang dihadapi dan persoalan besar yang menghadang bangsa dan negara, Indonesia mampu mengatasinya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

“Dalam konteks menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu-lah, kita harus mampu menangkal aksi-aksi anarkisme, radikalisme, terorisme dan separatisme dari bumi nusantara yang kita cintai,” harapnya.(nt) foto: Iwan Armanias

Banyak Negara Islam Ingin Belajar Demokrasi dari Indonesia

Keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi saat ini mendapat perhatian masyarakat internasional terutama negara-negara Islam.



Mesjid Istiqlal Jakarta



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan ceramah Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (10/8/12).

“Banyak negara Islam, datang ke DPR ingin belajar tentang demokrasi

dari Indonesia. Mereka ingin mengetahui lebih jauh bagaimana praktek demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Afganistan yang baru saja menerapkan nilai-nilai demokrasi juga datang ingin belajar,” jelas Marzuki.

Dalam ceramah yang berjudul ‘Ajaran Islam Menjunjung Kehidupan Demokrasi’, Ketua DPR menggarisbawahi basis empirik agama dan demokrasi memang berbeda. Agama Islam berasal dari wahyu sementara demokrasi adalah pemikiran manusia. Namun secara substantif prinsip demokrasi banyak yang bersesuaian dengan ajaran Islam.

Ia memberi contoh beberapa dasar keilmuan dalam Islam yang bersesuaian dengan elemen demokrasi seperti musyawarah – As Syura, keadilan - Addala, kesejajaran – Al Musawwa, integritas - Amanah, akuntabilitas - Masghuliah, dan kebebasan - Kuriah. “Saya yakin pemikiran demokrasi-

pun pasti mengambil dari kitab suci Alquran dan sunnah rasul, pada saatnya akan ada yang menyampaikannya,” kata dia.

Demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Keberadaan wakil didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak mungkin semua rakyat di Indonesia mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar.

Kepada jamaah mesjid Istiqlal yang datang dari kawasan Jabodetabek, Ketua DPR juga memaparkan tentang filosofi dewan perwakilan, dimana prinsip amanah dan tanggung jawab menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat maka harus segera ditegur, itulah perwakilan rakyat.

Karena prinsip demokrasi inilah maka Alquran memberikan panduan dalam menentukan siapa wakil-wakil yang layak dipilih, siapa calon-calon pemimpin yang harus dipilih. Patokannya harus mendekati karakter nabi Muhammad SAW, dalam kalimat umum bisa disebutkan orang yang mempunyai integritas, kompetensi, komitmen yang sering kita sebut sebagai siddik, amanah, fathonah dan thabligh.

“Calon pemimpin yang kita pilih adalah seperti Rasulullah SAW yaitu fakir berilmu tinggi tapi rendah hati. Kaya tapi hidup sederhana, karena al fakir menyadari kekayaan bukan milik, kekayaan hanyalah titipan Allah SWT. Oleh karenanya seorang pemimpin adalah orang yang rendah hati, tidak menunjukkan kekayaannya dan merasakan kekayaannya adalah milik Allah semata,” demikian Marzuki. (iky)foto: wy/parle

Ketua DPR Sampaikan Pidato Peringatan HUT ke-67

DPR RI menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-67 MPR/DPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus. Agenda tunggal dalam rapat paripurna tersebut adalah mendengarkan pidato Ketua DPR RI.

“Setiap tahun agendanya hanya satu yaitu Pidato Ketua DPR yang akan memaparkan kinerja sekaligus pandangan terhadap perkembangan demokratisasi di tanah air,” kata Karo Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Winarko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/12).

Rapat Paripurna akan berlangsung di Gedung Nusantara II (29/8), mulai pukul 10.00 WIB. Pimpinan sidang memulai rapat dengan mengajak hadirin untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pendahulu yang telah membesarkan lembaga perwakilan ini. Warna lain dari paripurna dalam rangka ulang tahun ini adalah pembacaan doa pada bagian akhir rapat.

Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran para mantan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Mereka akan duduk ditempat khusus dibagian depan ruang rapat. Sementara di balkon juga akan dipenuhi oleh para tamu undangan, seperti organisasi Persatuan Istri Anggota DPR (PIA), Pengurus Koordinator Wartawan Parlemen serta pejabat eselon I sampai dengan IV Setjen DPR.

Setelah rapat paripurna ditutup, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemotongan tumpeng ulang tahun oleh Ketua DPR. Setelah itu pimpinan dan anggota DPR akan menyaksikan pameran foto jurnalistik ‘Warna Warni Parlemen#2’ dan mengikuti kegiatan aksi sosial Donor Darah bagi Kemanusiaan. (iky) foto:iwan armanias



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Pelni Diminta Lebih Kreatif untuk Dapat Bersaing

Ketatnya persaingan antar moda transportasi baik dari segi pelayanan maupun harga tiket membuat PT. Pelni sebagai operator angkutan laut di Indonesia kepayahan. Untuk dapat merebut perhatian publik, DPR meminta perusahaan BUMN ini mencari terobosan, berupaya lebih kreatif.

“Saya mendengar untuk merebut perhatian penumpang ke Surabaya mereka menekan harga tiket kelas I sampai Rp.200 ribu. Tapi ternyata itu dibawah nilai ekonomis, berat. Jadi kita minta Pelni lebih kreatif, perjalanan laut pasti ada kelebihanannya,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/8/12).

Rendahnya harga tiket pesawat udara memang telah membuat sebagian penumpang mudik lewat laut

berpindah. Ia menggambarkan dengan harga tiket hampir sama perjalanan ke Surabaya dengan pesawat udara hanya 1,5 jam, sementara dengan kapal bisa 20 jam. Ini jelas persoalan sehingga sulit bagi kapal laut untuk menjadi pilihan alternatif bagi calon pemudik.

“Bersaing tidak apple to apple bisa dibandingkan, tetapi mungkin ada yang mereka bisa nikmati di dalam kapal laut yang tidak bisa dinikmati penumpang pesawat. Ini kan harus disiasati, kita coba dorong PT PELNI untuk bisa create kapal laut sebagai sarana transpor-

tasi alternatif,” lanjut politisi Fraksi Partai Hanura ini.

Dari hasil pantauan menurutnya secara fisik sudah ada perbaikan sarana dan prasarana terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok. Terminal untuk penumpang di wilayah Barat terlihat lebih kinclong karena lantai keramik baru saja diganti. “Tapi yang terpenting menurut saya adalah di kapalnya, keluhan masyarakat masih cukup tinggi. Bagaimana membuat penumpang bisa nyaman dalam perjalanan berjam-jam,” demikian Erik. (iky)

CLAI Serukan Dukungan untuk Rohingya

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyerukan penghentian segala bentuk penistaan dan diskriminasi terhadap esensi, hakekat serta martabat kemanusiaan di atas muka bumi karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (tengah) saat konferensi pers terkait masalah Rohingya

Hal tersebut disampaikan saat menerima menerima Cendekiawan Lintas Agama Indonesia (CLAI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Priyo mengaku sempat kecewa karena pemerintah selaku pimpinan Asean tidak cukup proaktif menggunakan daya kewibawaannya untuk merespon kasus ini. Namun dalam beberapa hari terakhir ia menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah jauh lebih baik.

"Hari ini saya sampaikan dengan bangga bahwa pemerintah kita sudah lakukan diplomasi yang sepatutnya dilakukan oleh sebuah negara besar, sebagai pemimpin Asean untuk mencari solusi bagi masalah Rohingya dan Karen ini," tandasnya.

Ia menyambut baik langkah CLAI untuk mendorong pemerintah untuk lebih berperan sekaligus menjadikan tragedi di negara tetangga itu sebagai

pelajaran dan bertekad kasus seperti itu tidak boleh terjadi di Indonesia.

Pada kesempatan itu, juru bicara dari Persatuan Inteligencia Kristen Indonesia (PIKI), Cornelius D. Ronowidjojo mengatakan, sSemua institusi, instansi dan lembaga strata global-internasional PBB, regional Asean dan nasional termasuk penyelenggara negara Myanmar dan Indonesia wajib memaksimalkan segala upaya untuk menghentikan tragedi yang diderita oleh komunitas Rohingya dan Karen di Myanmar dan di belahan dunia lainnya.

CLAI didukung para tokoh dari gabungan 6 organisasi yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Keluarga Cendekiawan Budhis Indonesia (KCBI) dan Persatuan Inteligencia Kristen Indonesia (PIKI).

Sekjen KCBI Citra Surya mengingatkan manusia adalah ciptaan Tuhan, sehingga roh setiap insan sumbernya dari tempat sama. Apapun bangsanya, warna kulitnya haruslah saling mengasihi. Organisasi cendekiawan Budha tegasnya menyampaikan kepedulian atas tragedi yang terjadi, dan mengimbau semua pihak menyatukan tekad agar tragedi ini dapat diselesaikan dan jangan sampai terulang kembali.

Sementara Sekjen ISNU M. Kholid Syeirazi menjelaskan, 6 organisasi lintas agama yang mendukung CLAI sering berkumpul dan berdiskusi tentang permasalahan bangsa. "Kita bicara dalam nilai moral yang berlaku universal," ungkapnya. Ia secara khusus berharap pemerintah Indonesia bisa lebih proaktif dan memaksimalkan diplomasi bilateralnya dalam mengurai permasalahan yang menimpa etnis Rohingya dan Karen di Myanmar. (iky)foto:wy/parle

Ketua DPR Marzuki Alie Membuka Pameran Seni Lukis

Ketua DPR Marzuki Alie membuka pameran lukisan di Gedung DPR RI, Pameran ini bertujuan untuk melestarikan serta memperkenalkan seni lukis di Indonesia sebagai salah satu aset budaya yang luhur.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat meresmikan pembukaan pameran lukisan di Gedung DPR RI

“Sejarah seni lukis di bumi Nusantara juga memperlihatkan rangkaian perjalanan budaya penduduk nusantara yang khas, sesuai dengan karakter daerah masing-masing, seperti lukisan Bali dan lukisan daerah lainnya,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka pameran lukisan bertajuk “Gelar Pesona Seni Lukis Indonesia, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (13/8).

Menurutnya, seni lukis modern di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya penjajahan Belanda, nama-nama pelukis seperti Raden Saleh, S.Soedjono, Djoko Pekik, Basuki Abdullah, dan lain-lain yang pernah menghiasi pentas seni lukis Internasional, kata Marzuki Alie.

Marzuki Alie mengemukakan, bahwa cerita sukses mereka perlahan surut seiring dengan rendahnya minat dan perhatian kita terhadap perkembangan seni lukis di tanah air.

Dia menegaskan, karya-karya yang kita lihat pada pameran hari ini, adalah

merupakan visualisasi, konsep, dan penempatan tata letak setiap karya-karyanya, adalah aktualisasi dari para seniman lukis menjadi olah kreatifitas eksperimental atau ekspresi jiwa, yang ditransformasikan dalam obyek seni maupun lukisan kontemporen.

Ekplorasi yang dikembangkan mempertemukan corak surealis, impresionis, abstrak dan realis, kedalam media kanvas, dan benda seni lain, sehingga, pencapaian artistik karya-karya berada pada trans-spiritual.

Ketua DPR Marzuki Alie berharap, mudah-mudahan kreativitas ini tidak tergusur oleh kepentingan “pasar seni” yang biasanya dikuasai pedagang seni, seperti galeri komersial, kurator, dan sebagainya, sehingga membuka cakrawala baru dalam memperluas ruang rupa publik seni, terutama kepada publik di DPR-RI.

Marzuki Alie juga menambahkan, bahwa program yang mempertaruhkan pencapaian dan gagasan baru

seorang pelukis ini, diharapkan mampu menjadi oase yang menyegarkan, bahkan, mampu memperkaya ekspresi seni di Indonesia.

Sementara itu ketua Asosiasi Seni Lukis Indonesia Sembilang Sutan mengatakan, bahwa dirinya yang mewakili rekan-rekan pelukis sangat bersyukur sekali apa yang dicita-citakan selama ini untuk menyelenggarakan pameran lukisan di Gedung DPR ini akhirnya dapat terwujud.

Sembilang Sutan juga mengemukakan, dengan tercapainya dan terlaksana pameran seni lukis di Gedung DPR yang selama ini dicita-citakan ternyata bukanlah sebuah mimpi, dan ini terbukti dengan adanya penyelenggaraan pameran lukisan dengan tema Gelar pesona Lukis Indonesia 2012 dan dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie ini merupakan suatu penghargaan bagi para pelukis, kemudian akan dijadikan agenda tahunan. (Spy)/foto:iwan armanias/parle.

Setjen DPR RI Perkenalkan Logo Baru

Sekretariat Jenderal DPR RI kini hadir dengan logo baru yang mempertegas semangat dan identitas Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system bagi DPR RI.



Logo baru Setjen DPR RI



Gedung Setjen DPR RI

Logo baru ini sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 646/Sekjen/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditetapkan logo baru yang akan digunakan sebagai identitas Sekretariat Jenderal DPR RI, menggantikan logo lama yang berlambang Negara Garuda Pancasila.

Logo baru ini berbentuk bulat yang terdiri dari gedung Nusantara yang diapit padi dan kapas serta pita dengan tulisan Setjen DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan, logo baru Setjen DPR RI lahir mengikuti tuntutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lam-

bang Negara, didalamnya terdapat pengaturan tentang penggunaan lambang negara.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 ayat (1), dengan jelas disebutkan pihak yang dapat menggunakan lambang negara Garuda Pancasila yaitu, Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Peradilan, BPK, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati atau walikota, notaris dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU.

Nining mengatakan, logo ini bermakna, gedung Nusantara melambangkan segala bentuk aktivitas DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung, dengan kubah/atap gedung berwarna hijau mengandung arti dan sifat selalu memegang prinsip dapat dipercaya, memiliki kesinambungan, harmonis, stabilitas dan simbol kedamaian.

Adapun padi dan kapas melambangkan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedangkan pita dengan huruf Setjen DPR RI ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Lembaga Perwakilan Rakyat yang tidak terlepas/terpisahkan dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, kata Nining, makna logo Sekretaris Jenderal DPR RI adalah ungkapan suatu daya/upaya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR RI yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya nanti, logo Sekretariat Jenderal DPR RI akan digunakan untuk kop naskah dinas, cap dinas, amplop, dokumen resmi serta hal-hal lain yang memerlukan simbol yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 646/Sekjen/2012 terhitung tanggal 29 Agustus 2012 Sekretariat Jenderal DPR RI resmi menggunakan logo baru.

Keluarnya logo baru ini juga telah dilakukan sosialisasi, baik di internal pejabat dan pegawai dan kepada pihak yang berhubungan dengan Setjen DPR RI. Logo ini, tambahnya, juga telah didaftarkan hak ciptanya melalui Kementerian Hukum dan HAM. (parle) foto:parle

HUT DPR Diwarnai Hiburan Rakyat

Peringatan HUT DPR RI ke-67 yang jatuh pada tanggal 29 Agustus dimeriahkan penampilan dalang terkenal Ki Manteb Sudarsono.

Hibura rakyat dimaksudkan memeriahkan HUT ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia menampilkan wayang dengan lakon cerita Sumilaking Pedhut Wiratha.

Ketua DPR RI Marzuki Alie dan jajaran pimpinan lainnya dijadwalkan akan hadir berbaur bersama rakyat menyaksikan tontonan ini. Pelaksanaan acara di Lapangan Sepakbola DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Sabtu (1/9) mulai pukul 19.30 WIB.

Lakon yang akan dibawakan Ki Manteb Sudarsono sangat menarik, menggambarkan negara Wiratha berupaya bangkit dari krisis multi dimensi. Banyak pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya, masyarakat terpecah belah, para nayaka tidak lagi menjiwai dan mengamalkan 5 gegebengan angger ugering negara.

Ancaman terhadap negara Wiratha



yang dipimpin Raja Matswapai semakin bertambah karena dua negara tetangga Astina dan Trigarta bersekutu dan ingin menyerang negara itu. Mereka sangat yakin negara dalam kondisi lemah ini akan sangat mudah ditaklukkan.

Perangpun terjadi, Raja Matswapai berhasil ditawan musuh. Namun berkat pencerahan yang dilakukan Pandawa yang saat itu sedang menyamar, Negara Wiratha dapat bangkit kembali.

Cerita Sumilaking Pedhut Wiratha adalah kisah penuh makna yang diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi publik termasuk para pemimpin agar mengedepankan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi. Pemimpin harus mendengar aspirasi rakyat, tidak boleh sewenang-wenang. Rakyatpun harus mempunyai jiwa kebangsaan dan bela negara. (iky) foto: iwan armanias

DPR Gelar Aksi Sosial Donor Darah

Keluarga besar parlemen yang tergabung dalam Keluarga Sehat dan Donor Darah Parlemen Indonesia (KSDD-PI) kembali menggelar aksi sosial 'Donor Darah bagi Kemanusiaan' dalam rangka HUT RI dan HUT DPR ke-67.



Ketua komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat acara donor darah bagi kemanusiaan dalam rangka HUT RI dan HUT DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.



Salah satu staf karyawan setjen DPR RI berpartisipasi dalam acara donor darah bagi kemanusiaan dalam rangka HUT RI dan HUT DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

gota DPR dan DPD serta Setjen MPR/ DPR/DPD adalah komunitas yang peduli kesehatan dan donor darah. Kita ingin menunjukkan disini tidak hanya ada kegiatan politik tetapi juga kegiatan sosial, salah satunya donor darah," kata Karo Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Winarko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/12).

Sebelum KSDD lahir 20 Mei 2005 kegiatan donor darah di komplek parlemen Senayan cenderung insidental dan sporadis. Padahal aktivitas ini perlu diatur dalam rentang waktu tertentu sehingga tujuan kesehatan fisik pendonor dapat tercapai. KSDD yang saat ini dipimpin Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX akhirnya dapat menata jadwal kegiatan setiap tahunnya sehingga membantu PMI dalam menjaga ketersediaan darah bagi yang memerlukan.

"Kita bersyukur aksi sosial donor darah di DPR ini selalu dipenuhi peminat, baik anggota DPR, anggota DPR, karyawan Setjen bahkan masyarakat yang datang sukarela. Tahun lalu kita sampai menolak calon pendonor karena PMI kehabisan kantong darah," lanjutnya.

Djaka yang juga sekretaris KSDD ini berharap kasus penolakan calon donor untuk tahun ini dapat diatasi oleh PMI. Baginya adalah ironi ditengah kebutuhan darah yang tinggi tetapi ada kondisi dimana pendonor terpaksa ditolak karena kantong darah tidak mencukupi.

Kegiatan "Donor Darah bagi Kemanusiaan" akan dilaksanakan pada Rabu (29/8), mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB di Gedung Nusantara DPR RI. Acara ini tidak hanya bagi anggota KSDD tetapi terbuka untuk siapa saja yang terpenggil untuk membantu sesama. "Menjadi donor darah yang rutin dan teratur akan menciptakan jasmani dan rohani yang sehat sekaligus amal baik kepada sesama," kata dia. (iky) foto:iwan armanias

Kegiatan ini diharapkan dapat mengirimkan pesan pada publik, kepedulian sosial kepada sesama memerlukan aksi nyata dan segera.

"KSDD yang beranggotakan ang-

Pidato Antikorupsi Presiden SBY Bagus, Implementasi Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Basyarah menilai Pidato Kenegaraan Presiden SBY dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI tentang pemberantasan korupsi sangat bagus dan menunjukkan political will dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ia berharap para pembantu presiden dapat menterjemahkan sikap tersebut dalam upaya penegakan hukum yang lebih konkrit.



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT RI ke-67 di Gedung DPR RI

disampaikan dalam pidato tersebut dan sebagai pembantu presiden harus dapat menerjemahkannya. Presidenpun menurutnya harus mampu mendorong ucapannya diimplementasikan.

“Presiden diberi kewenangan negara untuk itu, ucapannya menjadi kebijakan. Itulah kelebihan dibanding kita-kita. Oleh sebab itu Presiden tidak boleh berhenti di tingkat wacana tetapi implementasinya juga harus bersama,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPPP Dimiyati Natakusumah menilai Presiden SBY saat menyampaikan pidato terlihat jelas tidak senang dengan masih maraknya perilaku korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. “Mimik muka beliau kita sudah baca, body language beliau terlihat jelas tidak senang dengan kondisi bangsa yang masih terjebak korupsi,” paparnya.

Terkait pertikaian penanganan kasus simulator uji SIM antara KPK

dan Polri baginya pesan Presiden SBY sangat jelas yaitu meminta proses hukum harus tetap berjalan lurus sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. “Bagi saya Presiden SBY sudah menengahi perkara itu agar diserahkan kepada KPK,” jelasnya.

Namun ia mengakui kalau kasus ini juga menyangkut masalah internal kepolisian, sehingga Kapolri tidak bisa berhenti begitu saja. “Memang berat jadi Kapolri sekarang, kebiasaan culture kepolisian yang harus direformasi. Tapi saya percaya Jendral Timur Pradopo ini kan tingkat spiritualnya cukup bagus, ini yang dia perjuangkan sekarang,” imbuhnya.

Ia berharap pidato Presiden SBY dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI ke-67 dapat menjadi angin segar bagi penegak hukum dalam meningkatkan upaya perang melawan korupsi. “Jangan sampai pidato Presiden ini masuk kuping kanan keluar kuping kiri,” pungkasnya. (iky) foto: Iwan Armanias



Anggota Komisi III DPR Dimiyati Natakusumah

“Masalahnya sekarang ada dimana gepnya, kalau presiden sudah punya political will, pidatonya bagus. Sekarang tinggal pembantunya dalam upaya konkrit penegakan hukum dilapangan. Itu yang harus kita kritisi jangan sampai pidato presiden itu hanya manis di kata-kata, yang paling penting implementasinya, bukan pidatonya,” paparnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/12).

Politisi Fraksi PDIP ini menambahkan Jaksa Agung dan Kapolri seharusnya bisa menangkap pesan yang

Ketua DPR: Kunker ke Luar Negeri Sudah Dibatasi

Harapan masyarakat agar DPR melakukan pengetatan terhadap kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sudah dipenuhi. Rapat konsultasi Pimpinan DPR telah menyepakati pengurangan kuantitas dan pengaturan kriteria kunker/studi banding yang masih dapat dilakukan.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kegiatan kunker DPR RI

“Kunker ke luar negeri dalam kaitan pengawasan, pimpinan sepakat tidak mengizinkan. Kalau ini di lepas anggota DPR akan lebih banyak keluar negeri,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (27/8/12).

Disepakati pula kunker ke luar negeri yang dibolehkan adalah apabila terkait penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU). “Pimpinan sepakat anggota dapat melakukan studi banding ke luar negeri terkait RUU yang akan disahkan menjadi UU. Ini penting karena UU adalah kebijakan publik yang harus disiapkan secara

benar komprehensif, dengan melihat berbagai aspek dan kepentingan,” tandasnya.

Doktor marketing politik ini mengingatkan agar publik memahami salah satu icon penting tugas DPR adalah di bidang legislasi yaitu menyiapkan RUU menjadi UU yang berkualitas bersama pemerintah. Dalam kaitan kunker Pansus RUU Desa ke Brazil menurutnya banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti hubungan pusat daerah, keragaman dalam bingkai NKRI, dll.

“Pansus RUU Desa dipandang perlu studi banding ke Brazil, Jerman dan Cina. Cobalah kita buka internet, gali informasi disana, apa kita bisa dapatkan

informasi secara utuh. Nah kehadiran disana, kita bisa diskusi, dialog, dapatkan informasi yang lebih lengkap dan konkrit. Jadi jangan dianggap selalu habiskan dana,” lanjutnya.

Anggaran yang digunakan dalam kunker tersebut harus dipastikan berkorelasi dengan produk legislasi yang dihasilkan. “Boleh kunker ke luar negeri, kalau kira-kira RUU akan disahkan.” Disepakati pula apabila diperlukan studi banding dapat dilakukan pada revisi undang-undang yang dirombak lebih dari 50 persen. “Dibawah itu tidak perlu studi banding ke luar negeri,” demikian Marzuki. (iky) foto:parle

Pengungsi Rohingya Temui Komisi I DPR

Tiga orang perwakilan para pengungsi Rohingya bersama lembaga sosial kemanusiaan dari pusat informasi dan advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta PKPU menemui komisi I DPR guna meminta bantuan akomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia, Senin (13/8).

Para pengungsi meminta pelayanan sesuai standar kemanusiaan serta untuk tidak mengembalikan para pengungsi Myanmar tersebut selama kondisi keamanannya dinilai belum kondusif.

Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq mengatakan, kedatangan para pengungsi Rohingya penting bagi Muslim Indonesia. Pasalnya, isu kemanusiaan muslim Rohingnya saat ini tengah menjadi perhatian dunia dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.

“Kita ketahui bersama peristiwa yang menimpa Muslim Rohingnya di Myanmar saat ini menjadi kabar yang menggemparkan seluruh dunia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga sangat menyayangkan kejadian tersebut,” ujar Mahfud Siddiq di ruang Komisi I DPR.

Selain meminta bantuan akomo-



Ketua komisi I DPR Mahfud Siddiq saat menerima perwakilan pengungsi Rohingnya

dasi, para pengungsi muslim Rohingnya bersama lembaga kemanusiaan ini juga meminta pemerintah dan DPR memperjuangkan kesamaan hak dan peng-

hentian aksi kekerasan serta diskriminasi bagi warga Rohingnya di Myanmar. (as)/foto:iwan armanias/parle.

Presiden SBY Harus Tegas Ambil Kebijakan

Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menilai Pidato Kenegaraan SBY seyogyanya harus dilaksanakan secara konsisten dan konsepsi yang disampaikan harus membumi tetapi realitasnya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat.

“Sekarang timbul persoalan dimana Presiden yang mengharapakan penegakan hukum sinkron tetapi kenyataannya tidak sinkron, selain itu kita menyampaikan pembangunan infrastruktur harus diutamakan tetapi juga belum maksimal,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Kamis, (16/8).

Menurutnya, harus ada perubahan kebangkitan reformasi birokrasi yang harus optimal di tubuh birokrat. “Ini merupakan pidato kenegaraan dan harapan seorang Presiden namun sa-

yangnya tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh aparat dibawah beliau yang harusnya dimaksimalkan dengan baik. Hal-hal yang seharusnya beliau respon tidak direspons sementara yang tidak perlu beliau respons,”paparnya.

Terkait pemberantasan korupsi, dia menambahkan, hal itu sudah ditetapkan sejak tahun 2004 namun sayangnya aparat atau birokrasi Presiden SBY tidak tanggap dan karena itu Presiden harus mengambil kebijakan yang tegas. (si) foto:parle



Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo

Kemenag Perlu Sosialisasi Fatwa MUI Aliran Syiah Tidak Sesat

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kekerasan berdarah terhadap pemeluk ajaran Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, dia menilai aksi itu beranjak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan aliran Syiah bukanlah aliran yang sesat.

“Ada baiknya dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Agama bersama MUI. Kita tahu Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa syiah itu tidak sesat, artinya seharusnya tidak terjadi sesuatu seperti yang kita

dengar belakangan ini,” kata Marzuki dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/12).

Baginya kasus kekerasan berdarah di Sampang yang mengakibatkan 2 korban jiwa dan puluhan rumah dibakar jauh dari nilai-nilai Rahmatanlilalamin yang bermakna Islam memberikan rahmat kepada dunia beserta isinya. Nabi Muhammad SAW lanjutnya telah memberikan contoh bagaimana hidup berdampingan dengan damai bersama kepercayaan lain.

Ketika ditanya wartawan tentang kepentingan politik dibalik kekerasan tersebut, politisi Partai Demokrat ini menyebut kemungkinan itu perlu didalami. Ia berharap para pemimpin umat atau ulama di daerah dapat berperan meredam hal ini.

“Ulama itu-kan mengayomi umat agar jangan terjebak pada aksi kekerasan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Para pemimpin agama berada di wilayah independen, walaupun sering menerima sowan dari para politisi namun hendaknya jangan sampai terseret kepentingan politik,” lanjutnya.

Pada bagian lain Ketua DPR meminta aparat kepolisian mengoptimalkan kerja sama dengan masyarakat agar informasi kemungkinan munculnya kekerasan dapat dideteksi dini. “Kepolisian itu tentu ada keterbatasan, makanya kerja sama dengan masyarakat itu sangat penting, mendapatkan informasi apabila diperkirakan ada kemungkinan kerusuhan,” paparnya.

Ia mengingatkan saat ini rasio jumlah polisi dan penduduk di Indonesia masih sekitar 1 : 900 jauh dari standar ideal yang dianjurkan PBB yaitu 1 : 400. Kebijakan pemerintah yang akan menambah jumlah personil kepolisian sampai 20.000 orang pada anggaran tahun depan menurutnya patut didukung. (iky) foto: parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie



Korban kerusuhan Sampang Madura di tempat pengungsian

Kasus Korupsi Perlu Diselesaikan dengan Lebih Tepat dan Cepat

Perhatian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sangat besar. Institusi penegakan hukum ini diharapkan dapat menjawab perhatian tersebut dengan prestasi yang lebih baik.



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT RI ke-67 di Gedung DPR RI

“Ketiga aparat penegak hukum ini perlu melakukan koordinasi yang sinergis dalam menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dengan lebih tepat, cepat dan tidak berlarut-larut,” kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/12).

Ia menekankan agar dalam melaksanakan tugas memberantas kejahatan luar biasa korupsi, aparat penegak hukum memegang teguh aturan perundang-undangan yang ada. Baginya

keberhasilan pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional dan untuk mencapai tujuan nasional.

Pada bagian lain Ketua DPR juga menggarisbawahi konflik agraria yang terjadi di sejumlah daerah. Pemicu utama menurutnya adalah masalah perantaraan, terutama berkaitan dengan sistem kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah. Secara umum ia menilai kasus perantaraan yang mengemuka saat ini merupakan buah dari buruknya penanganan dimasa lalu.

“Persoalan agraria yang muncul akhir-akhir ini merupakan kebijakan

dalam rangkaian antar-rezim pemerintahan, akan tetapi pengelolaannya saat ini dan antisipasi atas berbagai berbagai masalah potensial berikutnya, harus tetap menjadi prioritas untuk ditangani,” tandasnya.

Pidato pembukaan masa persidangan Ketua DPR yang disampaikan dalam rapat paripurna ini dicermati oleh Presiden SBY dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Harapannya lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini program reforma agraria yang sudah direncanakan sejak 10 tahun yang lalu dapat segera dituntaskan. (iky) foto: iwan armanias

Bukhori: Doa itu Hasil Refleksi Itikaf Ramadhan di Mesjid

Anggota Komisi III DPR RI Bukhori Yusuf menerima ucapan selamat, tepukan dan pelukan dari para koleganya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai pembaca doa dalam acara Sidang Bersama DPR-DPD RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-67 Kemerdekaan RI.



Anggota Komisi III Bukhori Yusuf saat membacakan doa dalam acara Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-67



Anggota Komisi III Bukhori Yusuf

“Selamat Pak Buchori, doanya menyentuh sekali,” kata anggota Komisi VIII Oheo Sinapoy yang menemuinya usai acara di Lobi Ge-

dung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/12). Yang diberi selamat membalas dengan senyum cerah. “Alhamdulillah.”

Kepada wartawan ia mengaku sudah terbiasa membacakan doa di sejumlah kegiatan termasuk di partainya PKS. Khusus untuk acara Pidato Kenegaraan kali ini, ide mengalir deras setelah ia beritikaf di mesjid yang merupakan agenda wajibnya pada setiap 10 hari Ramadhan terakhir.

“Ketika dihubungi Sekjen DPR saya sedang melakukan itikaf Ramadhan di mesjid, jadi doa yang saya tulis sendiri ini, saya fikir bagian dari hasil refleksi kegiatan itikaf,” jelasnya. Bagi hadirin yang mendengarnya bagian awal dari doa itu terasa menyentuh.

“Agar doa kita lebih khusuk, maka kami mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama menghadirkan seluruh pikiran, mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, seraya membayangkan bahwa suasana bulan suci pada hari ini, seakan bulan suci

Ramadhan ditengah-tengah pekik kemerdekaan 17 Agustus, 67 tahun yang lalu.”

Sebagai anggota Komisi Hukum, Bukhori juga menyelipkan harapan untuk perbaikan penegakan hukum di negeri ini. “Dengan KekuasaanMu perbaikilah perilaku beragama kami sebagai benteng kehidupan kami, perbaikilah dunia kami sebagai tempat penghidupan kami, perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami. Perbaikilah para penegak hukum kami sebagai tempat mencari keadilan kami, perbaikilah seluruh penyelenggara negeri kami agar berpihak kepada rakyat dan negeri kami. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini sebagai tempat memperbanyakkebaikan.” demi kian salah satu doa dan harapan dari seorang Bukhori.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini menyebut doa yang disampaikan dan di-aminkan oleh pejabat publik di negeri ini mulai dari Presiden, Kepala Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, berasal dari suara hati rakyat yang mendambakan perbaikan. Beberapa bagian dari harapan itu pernah dilontarkan dalam rapat-rapat dengan mitra kerja terkait, tetapi dalam suasana kenegaraan mungkin bisa menggugah hati nurani siapapun yang mendengarnya.

“Berikanlah kepada kami dan bangsa kami serta seluruh pemimpin negeri ini rasa malu kepada-Mu yang mampu melahirkan tanggung jawab dalam mengemban amanah. Berikanlah kepada kami dan bangsa kami serta seluruh pemimpin negeri ini ketakwaankepada-Mu yang dapat mengantarkankami dan mereka pada surga-Mu.” Amin, perkenankanlah Ya Tuhan kami. (iky) foto:ry/parle

HUT DPR ke-67, Pewarta Foto Gelar Pameran

105 karya foto jurnalistik tentang dinamika kerja anggota DPR yang berhasil direkam wartawan foto parlemen ditampilkan dalam pameran dengan tema “Warna-warni Palemen #2”.

Pameran dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI dan HUT DPR ke-67 ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.

“Wartawan terutama jurnalis foto sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan DPR, mereka merekam dan mungkin menjadi bagian dari sejarah dikemudian hari,” kata Karo Humas dan Pemberitaan DPR RI, Djaka Dwi Winarko di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/12).

Ia berharap lewat pameran yang berlangsung tanggal 29 Agustus – 5 September publik dapat melihat dan menilai sendiri kinerja wakil mereka di parlemen. Baginya DPR dalam foto tidak sekedar ruang rapat yang sering digambarkan kosong, karena banyak aktifitas keparlemen yang menguras energi bahkan berlangsung sampai larut malam, luput dari perhatian khlayak.

“Beberapa kegiatan anggota DPR itu terkadang sulit digambarkan dengan kata-kata tetapi akan menggigit siapapun ketika melihatnya dalam foto jurnalistik. Ungkapan foto bisa melebihi seribu kata menjadi sangat pas untuk even ini,” tambahnya.

Ia berharap sinergi Humas dan Pemberitaan DPR bersama wartawan parlemen dapat menjawab keingintahuan masyarakat tentang lembaga perwakilan yang telah berusia 67 tahun ini. Siapapun yang berminat, mahasiswa, pelajar, peminat fotografi dapat datang langsung ke Gedung DPR menyaksikan pameran yang terbuka untuk umum ini.

Sementara itu Ketua Panitia Pameran, Fahri menjelaskan dalam kegiatan yang berlangsung untuk kedua kalinya ini telah diterima 500 lebih karya foto jurnalistik. Tim penilai yang terdiri dari fotografer senior telah menyeleksi dan menetapkan yang layak tampil se-



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko



Pimpinan DPR meninjau pameran foto di Gedung DPR RI

jumlah 105 foto. Jurnalis Koran Jakarta ini menjanjikan banyak kejutan dalam pameran kali ini.

“Pasti banyak foto menarik dan mengejutkan, saya tidak akan me-

ngatakan sekarang karena nanti tidak surprise lagi. Makanya datang dan saksikan sendiri pamerannya,” demikian Fahri.(iky)/foto:iwan armanias



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan kata sambutan dalam acara peresmian pameran lukisan di Gedung DPR RI dalam memperingati HUT DPR RI ke-67 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (13/8) foto:Iwan Armanias



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka acara pameran foto dengan tema “Warna Warni Parlemen#2” di Gedung DPR RI dalam memperingati HUT DPR RI ke-67 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (29/8) foto:Iwan Armanias



Wakil Ketua DPR Pramono Anung bersama Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Jaksa Agung dan Ketua Komisi II Agun Gunanjar saat menghadiri paripurna membahas RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (KDIY), Kamis (30/8) foto: WY



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**